

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
ABSTRAK	xxix
ABSTRACT	xxx
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Fokus Penelitian.....	14
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Manfaat Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum.....	20
2.1.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.1.1.1 Konsep Pengelolaan	20
2.1.1.2 Keuangan daerah	21
2.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	23
2.1.1.4 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
2.1.2 Konsep Dasar Penganggaran	26
2.1.2.1 Perencanaan dan Penganggaran	26

2.1.2.2	Jenis dan Prinsip Penganggaran di Sektor Publik.....	27
2.1.2.3	Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29
2.1.3	Landasan Hukum Keuangan Daerah	31
2.2	Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi	32
2.2.1	Konsep Transparansi	32
2.2.1.1	Definisi Transgparansi.....	33
2.2.1.2	Tingkatan Transparansi di Pemerintahan.....	34
2.2.1.3	Indikator dan Alat Ukur Transparansi	35
2.2.1.4	Prinsip Transparansi di Pemerintahan	36
2.2.1.5	Membangun Transparansi di Pemerintahan	37
2.2.2	Konsep Akuntabilitas	38
2.2.2.1	Definisi Akuntabilitas	38
2.2.2.2	Jenis Akuntabilitas.....	40
2.2.2.3	Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas.....	41
2.2.2.4	Membangun Akuntabilitas di Pemerintahan	42
2.2.3	Mencegah Korupsi melalui Transparansi dan Akuntabilitas	44
2.2.3.1	Penyebab Perilaku Korupsi di Pemerintahan.....	44
2.2.3.2	Mencegah Korupsi di Pemerintahan.....	45
2.3	Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi	47
2.3.1	Budaya Kerja Organisasi	47
2.3.1.1	Definisi Budaya Organisasi	48
2.3.1.2	Karakteristik, Unsur, dan Atribut Budaya Organisasi	48
2.3.1.3	Proses Terbentuknya Budaya Organisasi.....	51

2.3.1.4	Budaya Organisasi Kuat dan Lemah.....	54
2.3.2	Proses Belajar Organisasi	56
2.3.2.1	Pengetahuan, Penciptaan Pengetahuan, dan Manajemen Pengetahuan	56
2.3.2.2	<i>Explicit Knowledge</i> dan <i>Tacit Knowledge</i>	57
2.3.2.3	Kategori <i>Tacit Knowledge</i>	58
2.3.2.4	Teori <i>Knowledge Conversion</i>	61
2.3.2.5	Bentuk-bentuk Proses SECI	64
2.4	Peta Literatur Penelitian	69
2.4.1	Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum	73
2.4.2	Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi	75
2.4.3	Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi	79
2.5	Penelitian Terdahulu.....	81
2.6	<i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu.....	88
BAB III: METODE PENELITIAN		93
3.1	Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif	93
3.2	Rancangan Penelitian	95
3.2.1	Tahap Penentuan Topik Penelitian	97
3.2.2	Tahap Penentuan Rumusan Masalah	97
3.2.3	Tahap Pengumpulan dan Reviu Literatur	98
3.2.4	Tahap Pengumpulan Data	101
3.2.5	Tahap Analisis Data	101

3.2.6	Tahap Penarikan Kesimpulan	103
3.3	Objek Penelitian	104
3.4	Instrumen Penelitian	105
3.5	Jenis Data	106
3.6	Sumber Data	107
3.6.1	Strategi <i>Gatekeepers</i>	108
3.6.2	Strategi <i>Snowball</i>	111
3.7	Teknik Pengumpulan Data	114
3.7.1	Teknik Wawancara Mendalam	115
3.7.2	Teknik Dokumentasi	123
3.7.2.1	<i>Website</i>	123
3.7.2.1	Dokumen Internal	125
3.8	Pengujian Keabsahan Data	127
3.8.1	Uji Kredibilitas	127
3.8.1.1	Perpanjangan Waktu Penelitian	128
3.8.1.2	Triangulasi	129
3.8.1.3	Pengecekan Anggota	130
3.8.2	Uji Realibilitas	132
3.8.2.1	Pengecekan Kembali Hasil Transkrip	132
3.8.2.2	Pengecekan Hasil Koding	133
3.9	Teknik Analisis Data	133
3.9.1	Analisis Model Miles dan Huberman	134
3.9.2	Mengolah Data dengan Bantuan <i>Software</i> NVivo	136

3.9.2.1 Melakukan Manajemen Data	138
3.9.2.2 Melakukan Analisis Eksploratif	139
3.9.2.3 Membuat Kategori Konsep	140
3.9.2.4 Melakukan Koding dan Membuat <i>Node</i>	141
3.9.2.5 Melakukan Proses Integrasi dan Disintegrasi	142
3.9.2.6 Melakukan Konstruksi Tema-tema Utama	142
3.9.2.7 Membuat Laporan Hasil Analisis Data	143
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	144
4.1 Pengenalan Bab	144
4.2 Profil Singkat Kabupaten Kulon Progo	146
4.2.1 Sekilas Terbentuknya Kabupaten Kulo Progo	146
4.2.2 Gambaran Umum Pemerintahan	150
4.2.3 Ringkasan Visi Misi Pembangunan Daerah	153
4.2.4 Riwayat Singkat Perekonomian Daerah	154
4.2.5 Sekilas Gambaran Keuangan Daerah	157
4.2.6 Sederet Prestasi Pembangunan Daerah	158
4.3 Gambaran Umum APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	162
4.3.1 Pendapatan Daerah	166
4.3.2 Belanja Daerah	167
4.3.3 Pembiayaan Daerah	168
4.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan	170
4.3.5 Rasio Belanja Daerah	173
4.3.6 Analisis Pembiayaan Daerah	174

4.4	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	175
4.4.1	Mekanisme Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel	176
4.4.1.1	Bersinergi Bersama Stakeholder dengan Melibatkan BKAD	180
4.4.1.2	Tersedia Media Publikasi Internal dan Eksternal	183
4.4.1.3	Konsultasi Publik dan Menyerap Aspirasi melalui Sistem Informasi Perencanaan	185
4.4.1.4	Tersedia Layanan Pengaduan Masyarakat	188
4.4.1.5	Pra-RKA dan Standar Evaluasi.....	190
4.4.1.6	Berorientasi Proses dengan Membentuk Pokja RPJM.....	193
4.4.1.7	Konektivitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....	195
4.4.1.8	Payung Hukum Perencanaan Memadai dan Mengikuti Aturan Berlaku	197
4.4.2	Mekanisme Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel	199
4.4.2.1	Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik	202
4.4.2.2	Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui	216
4.4.2.3	Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan.	217
4.4.2.4	Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran	219
4.4.2.5	Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan	222
4.4.2.6	Rakor dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD.....	225
4.4.2.7	Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai	227
4.4.3	Mekanisme Penatausahaan yang Transparan dan Akuntabel.....	229
4.4.3.1	Kerjasama yang Baik antara PPTK, PPK, dan Bendahara.	232

4.4.3.2	PPTK sebagai Fungsi Pembuat Dokumen Pertanggungjawaban	235
4.4.3.3	Sistem Panjar Berbasis Bukti Pertanggungjawaban.....	238
4.4.3.4	Komitmen Bersama Penyampaian SPj Tepat Waktu dan Lengkap	240
4.4.3.5	Keadaan Kas dan Aset Tetap yang Selalu Dimonitoring	242
4.4.4	Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	245
4.4.4.1	Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	247
4.4.4.2	Sinkronisasi Data Pelaporan Keuangan melalui PPK.....	249
4.4.4.3	Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	251
4.4.4.4	Penghargaan Kinerja Pelaporan	253
4.5	Budaya Kerja yang Membentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	255
4.5.1	Budaya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	255
4.5.1.1	Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi	258
4.5.1.2	Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif	262
4.5.1.3	Berorientasi dan Komitmen Melayani	265
4.5.1.4	Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral	268
4.5.1.5	Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi.....	269
4.5.2	Proses Belajar Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	275
4.5.2.1	Sosialisasi	279
4.5.2.2	Eksternalisasi	289
4.5.2.3	Kombinasi	301

4.5.2.4 Internalisasi	310
4.6 Perbaikan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	319
4.6.1 Kekurangan dan Kendala Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	321
4.6.1.1 Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	321
4.6.1.2 Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	322
4.6.1.3 Tidak Ada Petugas yang Mengakuntansikan Transaksi di PPKD	324
4.6.1.4 Masih Adanya Persoalan <i>Rent Seeker</i> dan Penyerapan Anggaran yang Rendah	325
4.6.1.5 Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yang Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah	327
4.6.2 Rekomendasi Perbaikan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transpran dan Akuntabel	329
4.6.2.1 Jadikan Variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan sebagai Salah Satu Indikator Kinerja.....	331
4.6.2.2 Jadikan Media Sosial sebagai Alat Penyebaran Informasi..	332
4.6.2.3 Bentuk PPK-SKPKD yang Dikoordinasikan oleh Bidang Akuntansi	334
4.6.2.4 Terapkan ASB di Semua Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah	335
4.6.2.5 Lakukan Upaya Optimalisasi Aset sesuai Aturan Berlaku.	338
BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	344
5.1 Simpulan	344
5.2 Implikasi dan Keterbatasan Penelitian	348

5.2.1 Implikasi Teoritis	349
5.2.2 Implikasi Praktis	349
5.2.3 Keterbatasan Penelitian	350
5.3 Saran	350
DAFTAR REFERENSI	353

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Propinsi	3
Tabel 1.2: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Modus	4
Tabel 1.3: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga.....	5
Tabel 1.4: Indeks Akuntabilitas Kabupaten di Indonesia versi <i>Local Budget Index</i> Tahun 2017.....	10
Tabel 1.5: Indeks Transparansi Kabupaten di Indonesia versi <i>Local Budget Index</i> Tahun 2017.....	11
Tabel 4.1: Ringkasan Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dan 2018	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	25
Gambar 2.2:	Gambaran Umum Struktur APBD Berdasarkan Kelompok Akun Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	30
Gambar 2.3:	Spiral Proses Pengetahuan SECI	62
Gambar 2.4:	Peta Literatur Penelitian	71
Gambar 3.1:	Diagram Alir Penelitian	96
Gambar 4.1:	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo	147
Gambar 4.2:	Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo	152
Gambar 4.3:	Peta Analisis Akhir-Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018	164
Gambar 4.4:	Grafik Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Kulon Progo T.A 2017 dan 2018	171
Gambar 4.5:	Grafik Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dan 2018	173
Gambar 4.6:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	179
Gambar 4.7:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	201
Gambar 4.8:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	231
Gambar 4.9:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	246
Gambar 4.10:	Peta Analisis Akhir Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	257

Gambar 4.11: Peta Analisis Akhir Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	276
Gambar 4.12: Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	278
Gambar 4.13: Peta Analisis Akhir Kekurangan dan Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	320
Gambar 4.14: Peta Analisis Akhir Rekomendasi dan Saran Perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	330

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	<i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu Berdasarkan Jumlah <i>Source</i> ..	364
Lampiran 2:	<i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu Berdasarkan Jumlah Kata	365
Lampiran 3:	Surat Izin Penelitian	366
Lampiran 4:	Profil Partisipan Wawancara	368
Lampiran 5:	Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017	369
Lampiran 6:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017	380
Lampiran 7:	<i>Matrix Coding</i> Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	383
Lampiran 8:	<i>Matrix Coding</i> Budaya Kerja dan Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	384
Lampiran 9:	<i>Matrix Coding</i> Kekurangan, Kendala, dan Solusi untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	385
Lampiran 10:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	386
Lampiran 11:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	430
Lampiran 12:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	725
Lampiran 13:	<i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	734
Lampiran 14:	<i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	752

Lampiran 15: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	781
Lampiran 16: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	792
Lampiran 17: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	797
Lampiran 18: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Sosialisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	814
Lampiran 19: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Eksternalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	833
Lampiran 20: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Kombinasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	846
Lampiran 21: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Internalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	861
Lampiran 22: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	876
Lampiran 23: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	879
Lampiran 24: <i>Framework Matrix</i> Dokumentasi tentang Gambaran Umum dan Postur APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo.....	882